Diplomasi Komersial Indonesia dalam Menarik Investasi Dari Korea Selatan Pada Industri Kendaraan Listrik

Vebyan Syafitra[1], Anita Afriani Sinulingga[2], Diah Anggraini Austin[3]

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Andalas, Padang, Indonesia

E-mail: vebyansyafitra18@gmail.com[1], nanisinulingga@gmail.com[2],
diahanggrainiaustin@soc.unand.ac.id[3]

Abstract

Diplomacy is an important instrument in advancing the Indonesian economy, one of which is by attracting foreign investment. Indonesia's efforts to develop the electric vehicle industry can be realized because of Indonesia's success in attracting investment in the electric vehicle industry from South Korea. This study uses the concept of commercial diplomacy from Olivier Naray and Michael Kostecki. Descriptive qualitative approach and literature study data collection techniques that use secondary data. This study aims to describe the commercial diplomacy by Indonesia in attracting investment from South Korea through main and supporting activities. The main activity in this research is the promotion of FDI. This is due to the efforts of the Indonesian government to attract investment from South Korea following the main activities of promoting FDI which is indicated by the Indonesian government conducting investment promotions by conducting seminars on investment opportunities and conducting industry-related investment agreements. In supporting activities the Indonesian government provides information on holding business forums and business networks, as well as getting involved in signing investment agreements and supporting foreign investors with the laws that apply in Indonesia in the electric vehicle industry.

Keywords: *Commercial Diplomacy, Investment, Electric vehicle Industry, Indonesia, South Korea.*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2019 Presiden Joko Widodo mempercepat pengembangan industri kendaraan listrik Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target bahwa pada tahun 2025 produksi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) mencapai 400 ribu unit untuk roda empat dan 1,76 juta unit roda dua (Rizka 2021). Menurut Presiden Joko Widodo, Indonesia harus menjadi aktor utama dalam industri mobil listrik di level global. Adanya mobil listrik dapat menekan

jumlah kendaraan konvensional yang berkontribusi pada peningkatan konsumsi Bahan Bakar Minyak dan emisi gas karbon. Untuk memproduksi mobil listrik dibutuhkan sumber daya alam, khususnya nikel yang menjadi komponen utama pada baterai mobil listrik.

Sumber daya alam yang tersedia memerlukan modal untuk mengembangkannya menjadi produk jadi. Indonesia memiliki hambatan dalam pembangunan industri mobil listrik seperti tingginya biaya dalam pengembangan kendaraan, belum ada sarana dan prasarana yang mendukung jika diberlakukan secara nasional, dan masih lemahnya penguasaan tekonologi mobil listrik di Indonesia. Hambatan utama Indonesia dalam membangun industri kendaraan listrik adalah hambatan infrastruktur dan biaya. Hambatan biaya salah satunya adalah ketersediaan modal atau pendanaan.

Investasi asing dapat menjadi sumber pendanaan dan juga dapat meningkatkan penguasaan teknologi, termasuk pada industri mobil listrik. Indonesia berusaha menarik investasi asing dari Korea Selatan karena penguasaan teknologi dan modal yang dimiliki Korea. Pada tahun 2019 Hyundai Motor Company (HMC) menanamkan modalnya di Indonesia sebesar US$1,55 miliar atau Rp21,8 triliun untuk membangun pabrik yang akan memproduksi mobil tenaga bensin dan juga mobil tenaga listrik di Bekasi, Jawa Barat. Investasi yang dilakukan oleh HMC ini tidak terlepas dari usaha pemerintah Indonesia dalam menarik investasi dari Korea Selatan.(Ismail and Mulyaman 2021)

Pemanfaatan kekayaan sumber daya alam dan tujuan untuk menggunakan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan mendorong Pemerintah Indonesia untuk berusaha menarik investor asing pada industri mobil listrik. Pemerintah Indonesia berusaha menarik investor asing untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam hal ini investasi dari Korea Selatan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan mendeskripsikan diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menarik investasi dari Korea Selatan pada industri mobil listrik Indonesia di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

METODE

Metode penelitian ini dengan pendekatan kualitatif berdasarkan data-data non-numerik dengan menghimpun data-data sekunder berupa artikel ilmiah dan laporan resmi yang hasilnya membentuk pola dari interaksi data kemudian menjadi dasar untuk menarik sebuah Kesimpulan (Marshall dan Rossman 2016). Literatur-literatur berkaitan dengan pembahasan mengenai diplomasi komersial yang dilakukan oleh Indonesia dalam menarik investasi asing dari Korea Selatan pada industri kendaraan listrik pada pemerintahan Presiden Jokowi. Pendekatan deskriptif-kualitatif yang peneliti gunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengetahui secara mendalam mengenai diplomasi komersial yang dilakukan oleh Indonesia dalam menarik investasi dari Korea Selatan pada industri kendaraan listrik.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa tulisan yang menjadi rujukan atau tulisan yang relevan sebagai acuan dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka yang pertama adalah artikel dari Victor Tulus Pangapoi Sidabutar dengan judul "Kajian Pengembangan Kendaraan Listrik di Indonesia: Prospek dan Hambatannya." Karya ilmiah ini membahas hambatan yang dihadapi Indonesia dalam membangun industri mobil listrik yang dianalisis menggunakan teori *porter's five forces* yang dapat mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan suatu industri. Hasil dari penelitian terdapat hambatan bagi Indonesia dalam membangun industri mobil listrik yaitu hambatan infrastruktur dan biaya.

Tinjauan pustaka lainnya dari Journal of International Studies (Intermestic) Unpad yang berjudul "*Hyundai Investment On Electric Vehicles In Indonesia: A Push And Pull Factors Analysis*". Artikel ini ditulis oleh Achmad Ismail dan Darynaufal Mulyaman membahas mengenai alasan HMC melakukan *Foreign Direct Investment* (FDI) pada sektor mobil listrik di Indonesia. Tinjauan pustaka berikutnya adalah artikel dalam jurnal Batteries pada tahun 2021 yang ditulis oleh Andante Hadi Pandyaswargo, Alan Dwi Wibowo, Meilinda Fitriani

Nur Maghfiroh, Arlavinda Rezqita, Hiroshi Onoda yang berjudul "*The Emerging Electric Vehicle and Battery Industry in Indonesia: Actions around the Nickel Ore Export Ban and a SWOT Analysis*". Artikel ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana Indonesia melakukan pelarangan ekspor bijih nikel di saat permintaan bijih nikel dunia tinggi untuk kendaraan mobil listrik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Indonesia berupaya menarik investasi asing pada industri kendaraan listrik bertujuan untuk mencapai kepentingan ekonomi Indonesia yakni memperluas lapangan pekerjaan baru, menambah pendapatan negara, dan menjadi aktor penting dalam industri kendaraan listrik global. Sasaran dari upaya diplomasi komersial pemerintah Indonesia dalam upaya mencapai kepentingan ekonomi yakni pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia. Diplomasi komersial terdiri dari aktivitas utama dan aktivitas pendukung.

Aktivitas Utama Diplomasi Komersial

a. Promosi Perdagangan Indonesia Kepada Korea Selatan

Pada aktivitas utama *trade promotion*, Pemerintah Indonesia diwakilkan oleh Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk membantu pelaku usaha Indonesia mencapai pasar Korea Selatan dengan memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan hingga terkait strategi ekspor produk Indonesia ke Korea Selatan. Selain itu Kementerian Perdagangan berperan penting dalam mengeluarkan kebijakan terkait perdagangan yang bertujuan mendorong industri dalam negeri. Promosi perdagangan tidak berdampak langsung pada investasi industri kendaraan listrik.

b. Kerja Sama Sains dan Teknologi Antara Indonesia dan Korea Selatan

Industri kendaraan listrik berkaitan dengan penguasaan teknologi yang tinggi. Penguasaan teknologi kendaraan listrik di Indonesia masih lemah (Sidabutar 2020). Namun tidak ada kerja sama dalam hal penelitian teknologi

dan sains pada upaya menarik investasi asing dari Korea Selatan pada industri kendaraan listrik Indonesia.

c. Advokasi Pada Komunitas Bisnis Nasional Indonesia

Advokasi pada komunitas bisnis nasional mengenai keterlibatan pemerintah dalam memberikan advokasi kepada pihak bisnis nasional. Advokasi ini dilakukan untuk kepentingan perusahaan nasional dan bisnis nasional. Pada Perpres 55/2019 pada pasal 23 menginstruksikan perusahaan bisnis negara yaitu PLN sebagai penyedia infrastruktur. Pada landasan hukum tersebut memberikan instruksi penugasan kepada PLN juga tertuang pada Peraturan Menteri ESDM nomor 13 tahun 2020. Adanya penugasan ini tidak terlepas dari upaya advokasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM terhadap PLN. Kementerian ESDM menjadi aktor utama dalam advokasi pada komunitas bisnis nasional yang bertujuan untuk membantu tercapainya target dalam pembangunan infrastruktur kendaraan listrik.

d. Promosi Pariwisata Indonesia Kepada Korea Selatan

Promosi pariwisata digunakan negara untuk mempromosi tentang potensi tempat wisata yang dimiliki oleh negaranya dan budayanya. Adanya keindahan dan keunikan yang menjadi ciri khas suatu negara dipresentasikan bertujuan untuk membangun persepsi masyarakat asing terhadap keunggulan sektor pariwisata di negara. Pada aktivitas promosi pariwisata dalam konteks menarik investasi dalam industri kendaraan listrik di Indonesia tidak terdapat hal yang saling keterkaitan.

Promosi investasi Indonesia ke Korea Selatan yang dapat dilakukan oleh negara dalam menarik investor diantaranya *image-building, investment generation,* dan *investment-services*. Jika merujuk pada strategi promosi investasi Wells dan Wint, maka upaya diplomasi komersial yang dilakukan pemerintah Indonesia kepada Korea Selatan adalah *investment generation*. Beberapa aktivitas yang termasuk ke dalam pendekatan ini adalah melakukan

seminar informasi umum tentang peluang investasi, melakukan misi investasi khusus industri atau sektor dari negara sumber pesanan ke negara tuan rumah atau sebaliknya, melakukan seminar informasi spesifik industri atau sektor.

Pada tahun 2017 pemerintah Indonesia dalam deklarasi *RI-RoK Joint Vision Statement for Co-Prosperity and Peace* bersepakat dengan pemerintah Korea Selatan untuk meningkatkan hubungan bilateral dan kerja sama, salah satunya adalah investasi. Kesepakatan ini direalisasikan dengan komitmen investasi pada industri kendaraan listrik yang tandatangani oleh Hyundai Motor Company dan BKPM pada tahun 2018. Selain itu, kedua negara melakukan pertemuan bilateral di sela-sela pertemuan KTT ASEAN. Pada pertemuan bilateral tersebut kedua negara menyambut baik eskalasi hubungan bilateral dan kerja sama ekonomi antara kedua negara. Hasil dari tindak lanjut pada pertemuan bilateral tersebut adalah proyek kerja sama investasi LG Energy Solution untuk berinvestasi di Indonesia.

Realisasi proyek kerja sama investasi LG Energy Solution untuk berinvestasi di Indonesia tidak terlepas dari peran pemerintah Indonesia. BKPM bekerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan negosiasi dengan pihak LG. Hasilnya, BKPM menandatangani nota kesepakatan dengan LG Energy Solution di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 18 Desember 2020. Nota kesepakatan berisi tentang kerja sama investasi di bidang industri sel baterai kendaraan listrik. Upaya kunjungan yang dilakukan oleh kepala negara dan jajarannya merupakan bagian dari diplomasi komersial pada aktivitas utama *promotion of* FDI yang bertujuan untuk menarik investasi asing ke negara.

Diplomasi komersial yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada para pelaku usaha industri kendaraan listrik dengan memberikan dukungan. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia seperti yang dilakukan oleh kementerian-kementerian maupun lembaga pemerintah. Pada Perpres 55/2019 pembentukan berbagai regulasi yang lebih teknis diamanatkan kepada kementerian yang terkait hal ini membuat setidaknya terdapat 14 Peraturan

Menteri yang harus ditetapkan agar ketentuan dalam Perpres dapat terlaksana. Selain itu, pembentukan lembaga khusus juga diamanatkan dalam Perpres No. 55 Tahun 2019. Terdapat dua lembaga dengan nomenklatur Tim Koordinasi Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan Tim Kelompok Kerja Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ditugaskan untuk mengatur tata kerja kedua tim tersebut. Pada promosi investasi asing langsung BKPM dan Kementerian Luar Negeri selalu berberan sangat penting. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 56 tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri tugas dan fungsi, Kemenlu menjadi motor negosiator melalui diplomasi untuk mencapai kepentingan ekonomi (Kemlu RI 2019).

Dukungan yang diberikan pemerintah terhadap para pelaku usaha industri kendaraan listrik mampu membantu tercapainya kepentingan ekonomi Indonesia. Pada diplomasi komersial, pemerintah berperan aktif di dalam memberikan dukungan bagi para pelaku usaha industri kendaraan listrik untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Pada diplomasi komersial pihak swasta dan pasar memiliki peran yang penting yang dan mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah karena mengabaikan peran mereka akan berpengaruh terhadap daya saing negara di pasar dunia.

Dari aktivitas utama yang sudah peneliti jelaskan dalam diplomasi komersial dalam menarik investasi kendaraan listrik, aktivitas utama secara keseluruhan berdampak berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap investasi kendaraan listrik di Indonesia. Jika diplomasi komersial Indonesia dalam menarik investasi asing berdasarkan kerangka diplomasi komersial Naray dan Kostecki, maka *promotion of* FDI yang menjadi realisasi dari aktivitas utama diplomasi komersial yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Aktivitas utama yang juga memiliki irisan terhadap usaha menarik investasi pada industri kendaraan listrik di Indonesia. *Promotion of* FDI adalah aktivitas utama dalam diplomasi komersial dengan memberikan dukungan serta

memfasilitasi para pelaku bisnis industri kendaraan listrik untuk berinvestasi di Indonesia.

Aktivitas Pendukung Diplomasi Komersial

a. Aktivitas *Intelligence* Indonesia Kepada Korea Selatan

Intelligence merupakan aktivitas pendukung terkait penggalian informasi yang dibutuhkan dalam membangun hubungan bisnis antara *home country* dengan *host country*. Informasi terkait peraturan yang mempengaruhi kegiatan bisnis, dan sebagainya (Kostecki dan Naray 2007). Dalam hal ini, pemerintah memberikan dukungan dari segi informasi Korea Selatan di dalam peluang investasi industri kendaraan listrik di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui kementerian-kementeriannya juga turut aktif di dalam melakukan komunikasi dengan Korea Selatan terkait peluang investasi industri kendaraan listrik di dalam negeri.

Produksi nikel Indonesia meningkat sangat signifikan semenjak tahun 2019 didukung dengan cadangan nikel yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini membuat Indonesia berpotensi menjadi produsen nikel terbesar di dunia untuk kedepannya. Adanya bahan baku utama yang dimiliki Indonesia dapat menunjang efisiensi produksi kendaraan listrik sehingga dapat membuat harga yang ditawarkan kepada pasar lebih kompetitif.

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan berbagai insentif. Pada kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK-13/MK.010/2022 insentif diberikan untuk industri manufaktur seperti, tax holiday, tax allowance, dan super tax deduction untuk riset dan pengembangan. Pemerintah Indonesia kepada industri kendaraan listrik memberikan insentif bea masuk 0% atas kendaraan listrik berbasis baterai impor secara *Complete Knockdown* (CKD) atau *Incompletely Knockdown* (IKD) atau komponen utama dalam jangka tertentu. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK-13/MK.010/2022 secara khusus menyasar pada impor secara IKD yang mana dapat memberikan manfaat lebih besar bagi industri dalam negeri. Dari bentuk

intelligence yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui kementerian-kementerian beserta pemerintah daerah kepada Korea Selatan Indonesia, menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah aktif di dalam memberikan informasi terkait peraturan-peratuaran mengenai kewajiban bagi para pelaku usaha industri pertambangan untuk mengembangkan smelter di dalam negeri.

b. Jaringan dan Hubungan Masyarakat Indonesia Kepada Korea Selatan

Forum bisnis dan investasi dapat menjalin hubungan publik dan negara karena melibatkan pelaku bisnis antara kedua negara. Salah satu forum bisnis yang rutin diadakan kedua negara adalah Indonesia-Korea Business and Investment Forum. Forum ini rutin diadakan setiap tahun dan melibatkan pelaku bisnis kedua negara yang bertujuan mempermudah dan memfasilitasi investor asal Korea Selatan dalam berinvestasi di Indonesia.

c. *Contract Negotiator of Implementation* Indonesia Kepada Korea Selatan

Pengesahan investasi Hyundai di Indonesia pada industri kendaraan listrik melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dengan Hyundai Motor Company yang ditandatangani oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Presiden & CEO Hyundai Motor Company Won Hee Lee, dan disaksikan oleh Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, jajaran menteri pendamping lainnya, serta Executive Vice President Hyundai Motor Company.

Investasi yang ditanamkan oleh HMC sebesar USD 1,549 miliar di Indonesia. Investasi ini akan digunakan untuk memproduksi kendaraan listrik berbasis baterai lengkap dengan membangun R&D (pusat penelitian dan pengembangan). Ada dua fase realisasi investasi yang direncanakan oleh HMC di Indonesia. Pada fase pertama dari tahun 2019-2021 HMC akan berfokus pada investasi pabrik pembuatan mobil yang akan berlokasi di Jawa Barat dan akan mengekspor setidaknya 50% dari total produksi. Pada fase kedua dari tahun 2022 hingga 2030 akan berfokus pada pengembangan pabrik pembuatan mobil listrik, pabrik transmisi, pusat penelitian dan pengembangan, pusat pelatihan, dan produksi

Hyundai akan diekspor sebanyak 70%. Secara produksi sendiri HMC akan mulai berproduksi pada tahun 2021, dengan kapasitas 70.000 hingga 250.000 unit per tahun, termasuk mobil listrik ke depannya.

d. Penyelesaian Masalah Investasi antara Indonesia dan Korea Selatan

Investasi asing dapat dikatakan sebagai aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan aliran modal asing yang berasal dari home country kepada host country. Ketika suatu negara melakukan investasi ke negara lain ada beberapa hal yang dicermati seperti, situasi politik, ekonomi, hambatan perdagangan, perpajakan, perlakuan negara terhadap investor asing dan adanya perlindungan terhadap investor asing.

Adanya perlindungan terhadap investor asing juga merupakan nilai tambah yang dapat mempengaruhi investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara. Korea Selatan dan Indonesia memiliki kesepakatan bilateral dalam bidang investasi atau Bilateral Investment Treaty (BIT). Pada BIT antara Indonesia dan Korea Selatan diatur mengenai tidak diperbolehkannya melakukan diskriminasi dan nasionalisasi terhadap perusahaan asing. Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penyelesaian masalah yang dihadapi investor asing di Indonesia dapat diselesaikan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Aktivitas penyelesain masalah ini dinilai sebagai aktivitas pendukung dalam kerangka diplomasi komersial untuk menarik investasi asing di Indonesia pada industri kendaraan listrik.

KESIMPULAN

Diplomasi komersial yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung industri kendaraan listrik di Indonesia dengan berupaya menarik investasi asing dari Korea Selatan. Upaya menarik investasi asing tersebut berdasarkan aktivitas utama dalam diplomasi komersial adalah promotion of FDI. Hal ini dikarenakan pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan pendukung untuk yang menjadi daya tarik investor asal Korea Selatan untuk berinvestasi pada industri kendaraan listrik di Indonesia. Kebijakan pendukung

seperti insentif yang diberikan baik terhadap konsumen maupun terhadap industri kendaraan listrik Indonesia hingga pada infrastruktur yang mendukung. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk menjaga ketersediaan bahan baku industri kendaraan listrik sehingga dapat mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia baik terhadap sektor produksi maupun konsumen. Aktivitas utama lainnya pada diplomasi komersial secara langsung mendukung investasi pada industri kendaraan listrik Indonesia.

Upaya diplomasi komersial Indonesia didukung oleh aktivitas pendukung yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Aktivitas pendukung yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan kerangka konsep diplomasi komersial dari *intelligence, networking and public relations, contract negotiator of implementation*, hingga pada *problem solving*. Namun pada temuan peneliti, pada aktivitas pendukung *problem solving*, tidak ditemukan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan penyelesaian masalah jika terjadi sengketa atau masalah terkait investasi industri kendaraan listrik antara Korea Selatan dan Indonesia. Meskipun begitu, pemerintah Indonesia menyediakan undang-undang yang mengatur aktivitas investasi asing secara terkait penangan jika terjadi masalah.

DAFTAR PUSTAKA

Ajanovic, Amela. 2015. "The Future of Electric Vehicles: Prospects and Impediments." *Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment* 4 (6): 521–36. doi:10.1002/wene.160.

Asean Automotive Federation (AAF). 2020. "Asean Automotive Federation 2020 Statistic." http://www.asean-autofed.com/statistics.html

Asmara, Chandra Gian. 2019. "Jokowi Ke Menlu Retno: Perkuat Diplomasi Ekonomi." *CNBC Indonesia*, April 7, 2022. https://www.cnbcindonesia.com/news/20191023132819-4-109406/jokowi-ke-menlu-retno-perkuat-diplomasi-ekonomi.

Catherine Marshall and Gretchen B. Rossman. 2016. *Designing Qualitative Research*. *Issues in Applied Linguistics*. Vol. 6. SAGE Publications, Inc.

Darmawan, Erlangga Satya. 2022. "Komitmen Hyundai Dalam Mendukung Ekosistem Mobil Listrik Di Indonesia." *Kompas.Com*. Accessed November 16. https://otomotif.kompas.com/read/2021/11/19/132200615/komitmen-hyundai-dalam-mendukung-ekosistem-mobil-listrik-di-indonesia.

Hardori, Gabriella. 2021. "Implementasi Bilateral Investment Treaty Antara Indonesia Dan Korea Selatan Periode 2014-2018." *Moestopo Journal International Relations* 1 (2): 115–26.

IEA. 2020. "Global EV Outlook 2020 Entering the Decade of Electric Drive?" \

Income Inequality." Journal of Human Capital 11, no. 1 (Spring): 1–34. https://doi.org/10.1086/690235.

Kemlu RI. 2019. "Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri RI Tahun 2015-2019."

Kostecki, Michel, and Olivier Naray. 2007. "Commercial Diplomacy and International Business." *Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael,'* 3–4.

Mas'ud, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi*. I. Jakarta: LP3ES.

Pandyaswargo, Andante Hadi, Alan Dwi Wibowo, Meilinda Fitriani Nur Maghfiroh, Arlavinda Rezqita, and Hiroshi Onoda. 2021. "The Emerging Electric Vehicle and Battery Industry in Indonesia: Actions around the Nickel Ore Export Ban and a SWOT Analysis." *Batteries* 7 (4): 80. doi:10.3390/batteries7040080.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Pengelolaan Insentif Fiskal. n.d. Indonesia: Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden (PERPRES) Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan. 2019. Indonesia: LN.2019/NO.146, SIPUU.SETKAB.GO.ID, LL : 22 HLM. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/116973/perpres-no-55-tahun-2019.

Rizka, Fitriani Aulia. 2021. "Upaya Pemerintah Pada Pertumbuhan Industri Kendaraan Listrik." *Tagar.Id*, February 21. https://www.tagar.id/upaya-pemerintah-pada-pertumbuhan-industri-kendaraan-listrik.

Sabaruddin, Sulthon Sjahril. 2017. "Grand Design Diplomasi Ekonomi Indonesia: Sebuah Pendekatan Indeks Diplomasi Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 12 (1): 69. doi:10.26593/jihi.v12i1.2545.69-90.

Tulus Pangapoi Sidabutar, Victor. 2020. "Kajian Pengembangan Kendaraan Listrik Di Indonesia: Prospek Dan Hambatannya." *Jurnal Paradigma Ekonomika* 15 (1): 21–38. doi:10.22437/paradigma.v15i1.9217.